

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan merupakan penyelenggaraan atau pengurusan yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan adalah bagian dari “manajemen”. Kata manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000).

Pengelolaan sampah sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya suatu lingkungan. Sampah yang menumpuk tanpa adanya pengelolaan yang benar dapat menimbulkan permasalahan dan menghasilkan zat kimia berbahaya serta dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir. (Ujang, 2015).

Sampah menjadi problem saat ini, yang dimana jumlah volume sampah yang semakin bertambah sering dengan bertambahnya jumlah penduduk yang juga tidak diimbangi dengan luas pekarangan untuk pembuangan sampah yang memadai (Wesnawa, 2017). Kondisi ini jika terus dipertahankan tanpa adanya pengurangan volume sampah baik dari sumber sampah maupun di TPA maka kemungkinan lahan pembuangan akan lebih cepat penuh. Peningkatan volume sampah menyebabkan kebutuhan lahan penimbunan di TPA semakin meningkat.

Penting untuk memperhatikan kondisi sampah secara umum di Indonesia dan di beberapa sektor lainnya. Kondisi sampah di Indonesia yang secara umum mengkhawatirkan, terutama di beberapa tempat, merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Sampah adalah bagian penting dari kehidupan karena

hampir semua orang menghasilkan sampah. Produk sisa dari semua usaha manusia disebut sampah. (Isbandi Rukminto, 2003)

UU No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), yang telah dipilih oleh pemerintah daerah, pada dasarnya merupakan inti dari pengelolaan sampah.

Secara umum, sampah menjadi masalah ketika jumlah sampah lebih banyak daripada tempat yang tersedia. Sehingga meminimalisir dan membanjiri Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Oleh karena itu, metode utama sebuah kota untuk membuang sampah adalah dengan menghancurkannya dan menempatkannya di TPA. Jika otoritas penagkapan yang dimiliki pemerintah tidak mencukupi untuk menangani pengelolaan sampah ini, maka situasi ini akan semakin parah. (Notoatmodjo, 2011)

Cara pengelolaan sampah seperti ini sebenarnya tidak begitu efektif, karena sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia, baik rumah tangga maupun industri. Populasi masyarakat pasti akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sektor bisnis yang semakin pesat, yang kesemuanya akan menghasilkan berbagai produk sampah. (Riswan, Dkk : 2011)

Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Setiap daerah harus membuat komitmen untuk menyelesaikan masalah sampah. Hibah peralatan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah sampah, kemauan daerah untuk menanganinya juga penting. Persoalan sampah tidak hanya terjadi di ibukota dan

kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga di hampir semua daerah, termasuk di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematangsiantar.

Pemerintah Kota Pematangsiantar sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Regulasi yang ada belum sepenuhnya diterapkan karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah karena tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat, upaya pemerintah akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Kota Pematangsiantar hanyalah salah satu dari sekian banyak kota yang masih bergelut dengan pengelolaan sampah. Salah satu kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang merupakan bagian dari Kabupaten Simalungun, adalah Kota Pematangsiantar. Jalan Raya Lintas Sumatera melewati Kota Pematangsiantar karena lokasinya yang menguntungkan. Luas wilayah Kota Pematangsiantar adalah 7.997,1 Ha atau 79,97 km². Terdapat 53 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Pematangsiantar. (Wikipedia.com)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pematangsiantar memiliki 274.056 penduduk pada tahun 2022, atau 3.400 orang per km². Kota Pematangsiantar merupakan kota yang menghubungkan sejumlah lokasi di sekitarnya. Masyarakat dan pemerintah perlu menyadari bahwa untuk memanfaatkan lokasi Kota Pematangsiantar yang menguntungkan sebagai pintu gerbang antar kabupaten dan meningkatkan kualitas kota dan lingkungannya, estetika, kebersihan, dan kenyamanan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota. Dengan kepadatan penduduk sebesar 3.400/km², Kota

Pematangsiantar diperkirakan akan berkembang rata-rata 2,2% per tahun. Secara alamiah, aktivitas manusia akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Menurut data, Kota Pematangsiantar menghasilkan 587m³ sampah per hari pada tahun 2020. Perhitungan bulanan dapat digunakan untuk menentukan bahwa jumlah sampah yang dibuang, baik yang diangkut maupun yang tidak, terus bertambah hingga mencapai titik di mana tanah menjadi terbebani. Dari Januari hingga Desember 2020, total 183.077 m³ sampah dibuang setiap bulannya ke TPA Tanjung Pinggir di Kota Pematangsiantar. Dari Januari hingga Desember 2020, 7.300M³ kubik (berat) sampah layanan pasar dibuang di TPA Tanjung Pinggir. 4.725 M³ sampah PT STTC dibuang ke TPA Tanjung Pinggir antara bulan Januari hingga Desember 2020. Lokasi dan jadwal pembuangan sampah, yang semakin lama semakin tidak nyaman untuk sekelilingnya.. (*Kompasnasional.com*)

Gambar 1.1 Lokasi TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar



Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa kepadatan TPA berkontribusi pada peningkatan pencemaran lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah sampah ini, ketidaktahuan masyarakat tentang daur ulang sampah, dan partisipasi masyarakat dalam komunitas merupakan akar dari masalah ini. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas di TPA Kelurahan Tajung Pinggir Kota

Pematangsiantar masih belum memadai. Hal ini sangat merugikan masyarakat dan menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematangsiantar. Pengelolaan sampah yang baik akan mampu mengelola sampah yang dihasilkan dengan baik pula.

Tabel 1.1
Timbunan Sampah Kota Pematangsiantar Tahun 2020 – 2022

Tahun	Provinsi	Kota	Timbunan Sampah Harian (Ton)	Timbunan Sampah Tahunan (Ton)
2020	Sumatera Utara	Pematangsiantar	231.40	84.460,96
2021	Sumatera Utara	Pematangsiantar	233.02	85.052,00
2022	Sumatera Utara	Pematangsiantar	238.09	86.902,01

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa akan ada peningkatan tumpukan sampah dari tahun 2020 hingga 2022. Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pematangsiantar. Pengelolaan sampah merupakan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Masyarakat biasanya membuang sampah dengan membuangnya ke lokasi yang telah ditentukan oleh DLHK, dan petugas pengangkut sampah akan membawanya ke tempat pembuangan akhir. Ini adalah cara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menangani pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah.

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar mengatur strategi pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar. Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi penanganan, pengurangan, dan penguraian sampah.

Sebagai hasilnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membuat program pelatihan tentang pengomposan dan pupuk organik, mengelola sampah melalui 3R, memproduksi rijek dan botot, dan mengimplementasikan program walikota Pematangsiantar, LISA (Lihat Sampah Ambil), yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Kota Pematangsiantar.

Mengambil pelajaran dari penelitian sebelumnya, M. Akbar Rahman (2018) menyelidiki administrasi pengelolaan sampah melalui Android, dengan menghadirkan sebuah aplikasi bernama Daur Ulang. Dengan menggunakan program ini, pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan optimal. Sementara itu, Fauzul Hayat dan Titin Nasiatin (2023) meneliti tentang pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga selama pandemi COVID-19 dalam sebuah penelitian sebelumnya. Mereka menemukan bahwa masyarakat kurang peduli untuk memilah dan menggunakan kembali sampah, sehingga terjadi pencampuran antara sampah B3 dan non-B3. Akibatnya, sampah tersebut terus menumpuk dan akhirnya menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, penelitian sebelumnya tentang pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan oleh Gita Monica Ponomban, F.D.J. Lengkong, dan Very Londa (2019). Di daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang besar, beberapa individu tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini: pengorganisasian, perencanaan, mobilisasi, dan pemantauan.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada proses pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir, Kota Pematangsiantar. Hal ini meliputi teknik

operasional yang berkaitan dengan pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir, dan dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan pembuangan sampah. (Notoatmodjo Soekidjo, 2002: 26). Selain itu, hanya pengelolaan sampah di TPA yang sudah overload yang akan dikaji oleh peneliti, beserta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Sampah Pada TPA di Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan sampah Pada TPA di Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar?

1.3 Fokus Masalah

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian perlu ditetapkan fokus penelitian agar lebih terarah supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Proses Pengelolaan Sampah pada TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar yang meliputi perencanaan sampai dengan pembuangan akhir sampah (Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pembuangan Akhir/ Pemrosesan Akhir).
2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pengelolaan Sampah Pada TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar yang meliputi Man (manusia), Money (uang), Machines (mesin).

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan yang bertujuan unntuk memahami bagaimana proses Pengelolaan Sampah Pada TPA di Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Sampah pada TPA di Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam peneltian ini terbagi menjadi dua manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memperkuat dan meningkatkan kinerja suatu organisasi serta mengoptimalkan pemanfaatn sumber daya yang ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan administasi public dalam manajemen sampah untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas manajemen public.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan berguna bagi instansi DLKH Kota Pematangsiantar untuk mengatasi permasalahan persampahan pada masa yang akan datang, serta dapat menjadi bahan masukian bagi daerah-daerah lain terkait dengan pesoalaan pengelolaan sampah.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.